

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 12, NO. 1, JUNI 2021

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

**TRADE LIBERALIZATION, FOREIGN DIRECT INVESTMENT LIBERALIZATION, AND
WAGE INEQUALITY IN INDONESIA**

Astriyany and Shingo Takahashi

**THE RELATIONSHIP BETWEEN INDONESIA'S FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND
BILATERAL INTRA-INDUSTRY TRADE WITH JAPAN, CHINA, AND ASEAN-9**

Suhaila Marisa and Masaru Ichihashi

**DAMPAK KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT TERHADAP PERMINTAAN CPO
PADA INDUSTRI HILIR**

Bambang Irawan dan Nining I. Soesilo

REVITALIZATION OF FOOD BARNES TO SUPPORT COMMUNITY AND NATIONAL FOOD SECURITY

Putri Wulansari, Mhd. Rasidin, and Doli Witro

**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DAN UPAH RIIL:
ANALISIS TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA**

Siti Rogayah

**APAKAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH MEMENGARUHI POLA MIGRASI KELUAR?
BUKTI EMPIRIS DI INDONESIA**

Diana Sartika dan Vid Adrison

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 12, NO. 1, JUNI 2021

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Abstrak	vii-xiv
TRADE LIBERALIZATION, FOREIGN DIRECT INVESTMENT LIBERALIZATION, AND WAGE INEQUALITY IN INDONESIA	
<i>Astriyany and Shingo Takahashi</i>	1-13
THE RELATIONSHIP BETWEEN INDONESIA'S FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND BILATERAL INTRA-INDUSTRY TRADE WITH JAPAN, CHINA, AND ASEAN-9	
<i>Suhaila Marisa and Masaru Ichihashi</i>	15-28
DAMPAK KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT TERHADAP PERMINTAAN CPO PADA INDUSTRI HILIR	
<i>Bambang Irawan dan Nining I. Soesilo</i>	29-43
REVITALIZATION OF FOOD BARNs TO SUPPORT COMMUNITY AND NATIONAL FOOD SECURITY	
<i>Putri Wulansari, Mhd. Rasidin, and Doli Witro</i>	45-56
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DAN UPAH RIIL: ANALISIS TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA	
<i>Siti Rogayah</i>	57-69
APAKAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH MEMENGARUHI POLA MIGRASI KELUAR? BUKTI EMPIRIS DI INDONESIA	
<i>Diana Sartika dan Vid Adrison</i>	71-88

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KATA PENGANTAR

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (JEKP) Pusat Penelitian-Badan Keahlian Setjen DPR RI Vol. 12 No. 1 kembali hadir dengan menyajikan enam artikel. JEKP merupakan jurnal yang telah terakreditasi Sinta-2 yang berfokus kepada hasil penelitian bertema ekonomi dan kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat. Pada edisi kali ini, artikel *pertama* memuat tulisan dari Astriyani dan Shingo Takahashi dengan judul “*Trade liberalization, foreign direct investment liberalization, and wage inequality in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara liberalisasi perdagangan, liberalisasi penanaman modal asing (PMA), dan ketimpangan upah di Indonesia antara pekerja berkemampuan tinggi dan pekerja berkemampuan rendah, dengan menggunakan pendekatan teori perdagangan internasional Heckscher-Ohlin-Samuelson dan teori *Human Capital*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan dan liberalisasi PMA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan upah untuk pekerja berkemampuan rendah. Sedangkan bagi upah pekerja berkemampuan tinggi terdapat hubungan positif dan linier.

Artikel *kedua* ditulis oleh Suhaila Marisa dan Masaru Ichihashi dengan judul “*The relationship between Indonesia’s foreign direct investment and bilateral intra-industry trade with Japan, China, and ASEAN-9*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara PMA sektor manufaktur di Indonesia dan bilateral perdagangan intraindustri antara Indonesia dengan Jepang, China, dan ASEAN-9 pada level industri dengan menggunakan *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara PMA dan perdagangan intraindustri hanya signifikan pada industri tertentu. Dalam kasus Indonesia dan Jepang, PMA pada industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain memiliki korelasi tertinggi dengan perdagangan intraindustri. Sedangkan untuk kasus Indonesia dan Tiongkok, PMA pada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menunjukkan hubungan yang paling tinggi dengan perdagangan intraindustri. Dalam kasus Indonesia dan ASEAN-9, hubungan tertinggi antara PMA dan perdagangan intraindustri adalah pada industri tekstil. Sedangkan hubungan PMA dan perdagangan intraindustri berbeda-beda antarlokasi dan industri.

Artikel *ketiga* ditulis oleh Bambang Irawan dan Nining I. Soesilo, dengan judul “Dampak kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit terhadap permintaan CPO pada industri hilir”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan hilirisasi terhadap konsumsi CPO pada industri hilir dengan metode analisis *Fixed Effect Model*. Data yang digunakan merupakan data panel dari industri-industri hilir CPO dengan periode penelitian tahun 2000-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi dan kebijakan bea keluar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi CPO domestik. Sementara itu, jumlah perusahaan dan harga CPO internasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan *gap* harga dan *output* produksi tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap konsumsi CPO pada industri hilir.

Artikel *keempat* ditulis oleh Putri Wulansari, Mhd. Rasidin, dan Doli Witro dengan judul “*Revitalization of food barns to support community and national food security*”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tentang penguatan ketahanan pangan melalui modernisasi lumbung pangan yang bertolak dari kearifan lokal, serta sejauh mana modernisasi lumbung pangan menjadi solusi dalam mengatasi kerawanan pangan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis data literatur. Artikel ini menawarkan konsep modernisasi lumbung pangan, baik dari aspek pengelolaan bahan pangan maupun aspek manajerial dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat. Selain itu diusulkan sinergi antarbeberapa lumbung pangan masyarakat sehingga cakupan wilayah kerja menjadi lebih luas.

Artikel *kelima* ditulis oleh Siti Rogayah dengan judul “Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan upah riil: Analisis tingkat provinsi di Indonesia”. Penelitian ini menganalisis hubungan antara aspek Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) dan tingkat upah riil per jam di Indonesia dengan menggunakan metode regresi data panel GLS-efek acak pada data Sakernas, Susenas, dan PDRB dalam kurun waktu tahun 2002-2018 di 30 provinsi. Hasil studi menemukan bahwa peningkatan TPAKP di Indonesia justru menyebabkan tingkat upah riil per jam menurun. Hasil temuan ini merekomendasikan agar usaha peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebaiknya diikuti dengan ragam pekerjaan yang lebih bermutu.

Artikel *keenam* ditulis oleh Diana Sartika dan Vid Adrison dengan judul “Apakah pemilihan kepala daerah memengaruhi pola migrasi keluar? Bukti empiris di Indonesia”. Studi ini bertujuan untuk mempelajari pola migrasi keluar antardaerah pada saat pelaksanaan pilkada di Indonesia menggunakan data migrasi per semester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota dengan estimasi Model *Panel Fixed Effect*. Hasil menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan pilkada dapat menurunkan arus migrasi keluar pada daerah yang melaksanakan pilkada sebesar 0,01 persen, karena adanya efekantisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah dan masyarakat cenderung untuk melakukan *wait and see*. Selain itu, studi ini juga mengindikasikan bahwa arah kebijakan baru di daerah dapat menjadi insentif untuk menetap atau menunda waktu bermigrasi bagi potensial migran sehingga menurunkan arus migrasi keluar, setidaknya pada *short run*.

Kami mengharapkan artikel pada Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik edisi kali ini dapat memperkaya wawasan dan pemahaman pembaca, khususnya dalam analisis isu-isu terkait pemberdayaan ekonomi dan kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat. Selain itu, kami mengharapkan analisis pada tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan termasuk DPR RI dalam rangka merumuskan kebijakan yang optimal dan memberikan dampak terbaik bagi suksesnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Juni 2021

Hormat kami,

Tim Redaksi

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 12, NO. 1, JUNI 2021

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

Astriyany (Universitas Indonesia) and **Shingo Takahashi** (Universitas Hiroshima)

LIBERALISASI PERDAGANGAN, LIBERALISASI PENANAMAN MODAL ASING, DAN KETIMPANGAN UPAH DI INDONESIA

JEKP, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hal. 1-13

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kembali hubungan antara liberalisasi perdagangan, liberalisasi penanaman modal asing (PMA), dan ketimpangan upah di Indonesia antara pekerja berkemampuan tinggi dan pekerja berkemampuan rendah dengan mempertimbangkan teori perdagangan internasional yaitu Heckscher-Ohlin-Samuelson model dan teori tenaga kerja yaitu teori Human Capital. Panel data berasal dari data terbaru survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) antara tahun 2015 dan 2017 yang digunakan untuk mengestimasi pekerja berdasarkan jenis kelamin, umur, status perkawinan, gaji per jam, tingkat pendidikan dan klasifikasi industri. Ketimpangan upah diukur menggunakan dua tahap metode estimasi. Di metode tahap pertama, dengan menggunakan data SAKERNAS di level individu, data upah diregresi menggunakan karakteristik pekerja untuk mendapatkan estimasi koefisien ketimpangan upah yang diinginkan yaitu untuk pekerja berkemampuan tinggi dan pekerja berkemampuan rendah. Di metode tahap kedua, hasil koefisien dari metode tahap pertama digunakan sebagai variabel terikat untuk kemudian diregresikan dengan nominal tarif sebagai proksi atau representasi dari liberalisasi perdagangan dan PMA inflow sebagai proksi dari liberalisasi PMA. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa liberalisasi perdagangan dan liberalisasi PMA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan upah untuk pekerja yang berkemampuan rendah, sedangkan untuk ketimpangan upah pekerja berkemampuan tinggi terdapat hubungan yang positif dan linier. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan menurunkan ketimpangan upah antara pekerja berkemampuan tinggi dan pekerja berkemampuan rendah yang linier dengan HOS model dan liberalisasi PMA menaikkan upah untuk pekerja berkemampuan tinggi yang linier dengan teori Human Capital.

Kata kunci: liberalisasi perdagangan, liberalisasi PMA, ketimpangan upah

Suhaila Marisa (Universitas Indonesia) and Masaru Ichihashi (Universitas Hiroshima)

HUBUNGAN ANTARA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN PERDAGANGAN INTRAINDUSTRI DENGAN JEPANG, R.R. TIONGKOK, DAN ASEAN-9

JEKP, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hal. 15-28

Abstrak

Beberapa negara mencoba untuk lebih terlibat dalam perdagangan internasional untuk menjadi bagian dari jaringan global. Investasi asing dipercaya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skala ekonomi dari suatu negara. Oleh karena itu, negara berkembang seperti Indonesia mencoba untuk menarik lebih banyak penanaman modal asing (PMA). Tujuan utama PMA biasanya adalah berorientasi ekspor dan ingin bersaing di pasar global. Perdagangan intraindustri mengukur ekspor dan impor dalam satu kategori industri. Indeks perdagangan intraindustri yang mempunyai nilai tinggi berarti suatu negara memiliki integrasi yang kuat dengan negara mitra. Kajian ini mencoba menganalisis hubungan antara PMA sektor manufaktur di Indonesia dan bilateral perdagangan intraindustri antara Indonesia dengan masing-masing Jepang, China, dan ASEAN-9, khususnya pada level industri. Metode dari penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara PMA dan perdagangan intraindustri hanya signifikan pada industri tertentu. Dalam kasus Indonesia dan Jepang, PMA pada industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain memiliki korelasi tertinggi dengan perdagangan intraindustri. Sedangkan untuk kasus Indonesia dan China, PMA pada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menunjukkan hubungan yang paling tinggi dengan perdagangan intraindustri. Dalam kasus Indonesia dan ASEAN-9, hubungan tertinggi antara PMA dan perdagangan intraindustri adalah pada industri tekstil. Hubungan PMA dan perdagangan intraindustri berbeda antarlokasi dan industri.

Kata kunci: penanaman modal asing, manufaktur, perdagangan intraindustri

Bambang Irawan (Universitas Indonesia) dan Nining I. Soesilo (Universitas Indonesia)

DAMPAK KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT TERHADAP PERMINTAAN CPO PADA INDUSTRI HILIR

JEKP, Vol. 12, No. No. 1, Juni 2021, hal. 29-43

Abstrak

Industri minyak sawit Indonesia memiliki peran penting bagi perekonomian nasional sebagai penghasil devisa dan penyedia lapangan kerja serta sumber pendapatan rumah tangga. Dalam pengembangan industri sawit ini, Indonesia hanya menekankan pada ekspor CPO sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Konsumsi CPO domestik hanya sekitar 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya diekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan hilirisasi pemerintah terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* pada data panel dari industri-industri hilir CPO dengan periode tahun penelitian 2000-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi dan kebijakan bea keluar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi CPO domestik. Sementara jumlah perusahaan dan harga CPO internasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan *gap* harga dan *output* produksi tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Industri yang berpengaruh signifikan dalam menyerap CPO domestik adalah industri minyak goreng kelapa sawit, industri ransum makanan hewan, industri oleokimia dasar dan biodiesel serta industri minyak makan dan lemak nabati lainnya. Sedangkan industri minyak goreng kelapa dan industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan. Dari hasil penelitian ini disarankan kebijakan hilirisasi harus dibarengi oleh percepatan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan energi yang memadai sehingga tidak menghambat produksi dan juga kelancaran logistik.

Kata kunci: kebijakan hilirisasi, konsumsi CPO, industri hilir, *Fixed Effect Model*

Putri Wulansari (Institut Agama Islam Negeri Surakarta), **Mhd. Rasidin** (Institut Agama Islam Negeri Kerinci), and **Doli Witro** (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

REVITALISASI LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT UNTUK Mendukung KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DAN NASIONAL

JEKP, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hal. 45-56

Abstrak

Pasca diterapkannya kebijakan revolusi hijau serta keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga yang berperan menjaga kestabilan pangan, lumbung pangan masyarakat telah kehilangan eksistensinya. Dampak dari berkurangnya eksistensi lumbung pangan masyarakat tersebut dalam jangka panjang justru menyebabkan ketidakstabilan pangan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, penggunaan pupuk anorganik yang menyebabkan kesuburan lahan menurun sehingga menyebabkan hasil panen berkurang, terjadinya alih fungsi Bulog dari lembaga pemerintah menjadi BUMN/Perum, dan terjadinya peningkatan permintaan pangan yang disebabkan oleh peningkatan penduduk yang tidak sebanding dengan persediaan pangan yang ada. Tulisan ini bertujuan menggali lebih dalam tentang penguatan ketahanan pangan melalui modernisasi lumbung pangan yang bertolak dari kearifan lokal masyarakat Indonesia dan sejauh mana modernisasi lumbung pangan dapat menjadi solusi dalam mengatasi rawan pangan akibat belum tercapainya ketahanan pangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis data literatur, membahas alternatif konsep untuk merevitalisasi lumbung pangan masyarakat dalam upaya menjaga kestabilan ketahanan pangan masyarakat dan nasional. Konsep yang ditawarkan adalah memodernisasi lumbung pangan masyarakat baik dari segi pengelolaan bahan pangan yang disimpan, maupun aspek manajerial pengelolaan lumbung pangan masyarakat. Selain itu, perlu pengembangan kerja sama untuk bersinergi antar beberapa lumbung pangan masyarakat yang berdekatan dengan masyarakat sehingga cakupan wilayah kerjanya menjadi lebih luas.

Kata kunci: modernisasi pengelolaan, lumbung pangan masyarakat, ketahanan pangan

Siti Rogayah (Badan Pusat Statistik Indonesia)

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DAN UPAH RIIL: ANALISIS TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

JEKP, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hal. 57-69

Abstrak

Studi ini menganalisis hubungan antara dua aspek penting bagi pembangunan ekonomi, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) dan tingkat upah riil per jam di Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi data panel GLS-efek acak pada data Sakernas, Susenas, dan PDRB dalam kurun waktu 2002-2018 di 30 provinsi, ditemukan bahwa peningkatan TPAKP di Indonesia justru menyebabkan tingkat upah riil per jam menurun. Hal ini diduga terjadi karena mayoritas pekerja perempuan di Indonesia bekerja pada lapangan usaha yang memiliki tingkat produktivitas rendah sehingga membuat garis pasokan pekerja pada kurva penawaran tenaga kerja dan upah riil bergeser ke arah kanan yang bermakna terjadinya pergeseran titik upah riil ke tingkat yang lebih rendah. Penurunan tingkat upah riil per jam ini dialami baik oleh para pekerja perempuan maupun para pekerja laki-laki. Berdasarkan hasil temuan ini, maka studi ini merekomendasikan agar usaha peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebaiknya diikuti dengan ragam pekerjaan yang lebih bermutu bagi mereka. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi para perempuan khususnya pada lapangan usaha dengan tingkat produktivitas yang tinggi, dan suatu kebijakan guna menghilangkan pelbagai hambatan kerja, baik berupa hambatan domestik maupun eksternal, yang kiranya dapat menghambat kesempatan masuknya para perempuan ke pasar tenaga kerja.

Kata kunci: tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, kurva penawaran tenaga kerja, upah riil per jam, regresi data panel

Diana Sartika (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat) dan **Vid Adrison** (Universitas Indonesia)

APAKAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH MEMENGARUHI POLA MIGRASI KELUAR? BUKTI EMPIRIS DI INDONESIA

JEKP, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hal. 71-88

Abstrak

Perbedaan pola migrasi antardaerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan dasar. Desentralisasi merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, di antaranya melalui desentralisasi politik yaitu pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Oleh karena itu, akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan layanan dasar dari pemerintah daerah. Hal ini akan menyebabkan pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi keluar antardaerah pada saat pelaksanaan pilkada di Indonesia menggunakan data migrasi per semester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Sepanjang tahun pengamatan, hasil regresi menunjukkan bahwa ada efek antisipasi dan efek *lag* yang kuat dari pilkada pada arus migrasi keluar. Hasil estimasi menggunakan model *panel fixed effect* menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan pilkada dapat menurunkan arus migrasi keluar pada daerah yang melaksanakan pilkada sebesar 0,01 persen, karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah dan masyarakat cenderung untuk melakukan *wait and see*. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa terdapat efek *lag* yang kuat sebesar 0,02 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan baru di daerah dapat menjadi insentif untuk menetap atau menunda waktu bermigrasi bagi potensial migran, sehingga menurunkan arus migrasi keluar, setidaknya pada *short run*.

Kata kunci: migrasi, pilkada, Indonesia

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 12, NO. 1, JUNE 2021

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Astriyany (the University of Indonesia) and **Shingo Takahashi** (Hiroshima University)

TRADE LIBERALIZATION, FOREIGN DIRECT INVESTMENT LIBERALIZATION, AND WAGE INEQUALITY IN INDONESIA

JEKP, Vol. 12, No. 1, June 2021, pp. 1-13

Abstract

This study purposes to re-examine the relationship between trade liberalization, foreign direct investment (FDI) liberalization, and wage inequality between unskilled and skilled workers by considering international trade theories, the Heckscher-Ohlin-Samuelson model, and The Human Capital theory from labor economics. The panel data sourced from the latest SAKERNAS or National Labor Force Survey of Indonesia between 2015 and 2017 are estimated to determine employment by gender, age, marital-status, wages per hour, level of education, and classification of industry. Wage inequality is examined by using a two-stage estimation strategy. Specifically, in the first stage, using SAKERNAS data at the household level, wages are regressed with their worker characteristics to get coefficients of our interest, which are industry wage premium for unskilled workers and industry wage premium for a skilled worker. In the second stage, in the industrial level, two sets of estimated coefficients are used as dependent variables and regressed with nominal tariff and FDI inflow as proxy variables to trade liberalization and FDI liberalization, respectively. Our estimation showed that trade liberalization and FDI liberalization do have a statistically significant relationship with industry wage premium for unskilled workers. In contrast, there is a positive relationship for the case of an industry wage premium for skilled workers. Overall, the results show that trade liberalization decreases wage inequality between unskilled and skilled workers, which in line with the HOS model. Moreover, FDI liberalization increases wages for skilled workers, which in line with Human Capital theory.

Keywords: trade liberalization, FDI liberalization, wage inequality

Suhaila Marisa (University of Indonesia) and Masaru Ichihashi (Hiroshima University)

THE RELATIONSHIP BETWEEN INDONESIA'S FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND BILATERAL INTRA-INDUSTRY TRADE WITH JAPAN, CHINA, AND ASEAN-9

JEKP, Vol. 12, No. 1, June 2021, pp. 15-28

Abstract

Many countries try to engage more in international trade to be part of global networks. Foreign investment is one of the ways to improve a country's economies of scale. Thus, developing countries, such as Indonesia, try to attract more FDI. FDI is mainly export-oriented and wants to compete globally. Intra-industry trade measures export and import in the same industry. A high degree of intra-industry trade means a country has strong integration with a partner's country. This study examines the relationship between FDI in Indonesia's manufacturing sector and bilateral intra-industry trade between Indonesia and Japan, China, and ASEAN-9, especially at the industry level. The method of this study is the Fixed Effect Model. The result shows that the linkage between FDI and intra-industry trade is only significant in specific industries. In the case of Indonesia and Japan, FDI in the vehicle and other transportation industry has the highest correlation with intra-industry trade. Meanwhile, in the case of Indonesia and China, FDI in the metal, except machinery, and equipment industry shows the highest association with intra-industry trade. In the case of Indonesia and ASEAN-9, the highest linkage between FDI and intra-industry trade is in the textile industry. The relationship between FDI and intra-industry trade differs across locations and industries.

Keywords: foreign direct investment, manufacture, intra-industry trade

Bambang Irawan (the University of Indonesia) dan Nining I. Soesilo (the University of Indonesia)

THE IMPACT OF PALM OIL INDUSTRY'S DOWNSTREAM POLICY ON DOWNSTREAM INDUSTRY CPO DEMAND

JEKP, Vol. 12, No. 1, June 2021, pp. 29-43

Abstract

The Indonesian palm oil industry has an important role in the national economy as a foreign exchange earner, a provider of employment and a source of household income. In developing the palm oil industry, Indonesia only emphasizes on CPO exports so that the added value obtained is still low. Domestic consumption of CPO is only about 30 percent, while the other 70 percent is exported. This study aims to analyze the impact of the government's downstream policy on CPO consumption in the downstream industry. The analysis technique used in this study is Fixed Effect Model on panel data from the downstream CPO industries with the 2000-2015 research year period. The results showed that the downstream policy and the export duty did not have a significant effect on CPO consumption. The number of companies and international CPO prices have a positive and significant effect, while the price gap and production output in the previous year have a significant negative effect on CPO consumption. Industries that have a significant influence in absorbing domestic CPO are the palm cooking oil industry, the pet food ration industry, the basic oleochemical and biodiesel industry, and the edible oil and vegetable fats industry. Meanwhile, the coconut cooking oil industry and the soap and cleaning industry did not have a significant effect. From the results of this study, it is suggested that downstream policies should be accompanied by accelerated infrastructure development and adequate energy availability so as not to hamper production and smooth logistics.

Keywords: downstreaming policy, CPO consumption, downstream industry, Fixed Effect Model

Putri Wulansari (State Institute for Islamic Studies Surakarta), **Mhd. Rasidin** (State Institute for Islamic Studies Kerinci), and **Doli Witro** (State Islamic University of Sunan Gunung Djati Bandung)

REVITALIZATION OF FOOD BARNs TO SUPPORT COMMUNITY AND NATIONAL FOOD SECURITY

JEKP, Vol. 12, No. 1, June 2021, pp. 45-56

Abstract

After implementing the green revolution policy and the existence of the National Logistics Agency (Bulog) as an institution whose role is to maintain food stability, the people's food barns have lost their existence. The impact of the decline in the existence of community food barns, in the long run, causes food instability in Indonesia. This is due to several factors, including the conversion of agricultural land into industrial land, the use of inorganic fertilizers which causes soil fertility to decline resulting in reduced crop yields, Bulog's transfer of function from a government entity to a state-owned enterprise/Perum, and an increase in demand for food caused by a surge in population that is not comparable to the existing food supply. This paper aims to dig deeper about strengthening food security through the modernization of food barns departing from the Indonesian people's local wisdom and the extent to which the modernization of food barns can be a solution in overcoming food insecurity due to not achieving food security. This paper uses descriptive qualitative research methods based on literature data, discussing alternative concepts to revitalize community food barns to maintain community and national food security stability. The concept being offered is to modernize community food granaries in terms of both management of stored foodstuffs and managerial aspects of community food storage management. Besides, it is necessary to develop cooperation to synergize between several food barns that are close to the community so that the working area coverage becomes wider.

Keywords: management modernization, community food storage, food security

Siti Rogayah (Badan Pusat Statistik Indonesia)

FEMALE LABOUR FORCE PARTICIPATION RATE AND REAL WAGE: PROVINCIAL-LEVEL ANALYSIS IN INDONESIA

JEKP, Vol. 12, No. 1, June 2021, pp. 57-69

Abstract

This research explores the relationship between two essential aspects of economic development, namely the Female Labour Force Participation (FLFP) rate and the hourly real wage growth in Indonesia. Using the GLS-Random Effect Regression Method for panel data applied to Sakernas, Susenas, and RGDP Data for 2002-2018 in 30 provinces, this research finds out that when FLFP in Indonesia keeps increasing over time, the hourly real wage drops. This is thought to occur allegedly because most female workers in Indonesia work in business fields with a low level of productivity, which causes the labour supply line of the labour supply curve to shift to the right, which means that the real wage point shifts to a lower level. Both female workers and male workers have experienced this reduction in the hourly real wage. Based on this finding, this research recommends that an effort to increase female workers participation should be followed by a variety of more qualified jobs qualification for them. Also, some policies are needed to encourage the creation of wider job opportunities for women, especially in business fields with high productivity levels, and to eliminate various work barriers, both domestic and external, that would hinder female entry into the labour market.

Keywords: female labour force participation, labour supply, hourly real wage, panel data regression

Diana Sartika (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat) dan **Vid Adrison** (University of Indonesia)

DOES LOCAL ELECTION INFLUENCE OUTMIGRATION PATTERN? EVIDENCE FROM INDONESIA

JEKP, Vol. 12, No. 1, June 2021, pp. 71-88

Abstract

Differences in migration flow between regions suggest a gap in development, such as amenities and public goods provision. Indonesia has decentralized to reduce this gap, including through direct election at the regional level (pilkada). The elected leader can provide public goods and services according to people's needs and preferences. A change in policy direction related to amenities and the provision of public goods from local government will occur at the election time. This influences different migration patterns. This study specifies and estimates a panel model for inter-municipal outmigration in Indonesia during the elections period using Indonesia's 514 municipal migration data between 2014 and 2018 from the Ministry of Home Affairs. We show that throughout the observed year our regression analysis demonstrates that there are a strong lead effect and lag effect of local election on the size of outmigration flows. Our findings thus suggest that local election can reduce outmigration flow in a district that went through election by 0.01 percent, due to public anticipation on the new policy direction of the prospective regional head and people tend to wait and see. Other findings suggest that there is a strong lag effect, by 0.02 percent. These results indicate that new policy direction may provide incentives to stay or delay the timing of migration for potential migrant, thus reduce the migration outflow, at least in the short run.

Keywords: migration, local election, Indonesia